



1.500 Permohonan Terkatung-katung

Wali Kota Yogya Ingin Percepatan Penuntasan PBG Tahun Ini

YOGYA, TRIBUN - Ribuan permohonan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Yogyakarta tercatat terkatung-katung alias mengalami kemendakan proses. Sebagian permohonan izin PBG yang prosesnya terhenti, ditengarai akibat kurangnya persyaratan dan ditarget dapat tuntas pada tahun ini.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut, ada sekitar 1.500 permohonan PBG di 2024 yang belum selesai karena prosesnya mengantung. Ia pun mencanangkan, permohonan PBG segera diselesaikan di 100 hari kerjanya, atau paling tidak pada penghujung 2025, sehingga awal 2026 proses sudah bergulir *real time*.

"Kalau memang tidak bisa (diproses), ya divonis tidak bisa, jadi kan selesai. Kalau ini kan mengantung, itu yang harus segera diselesaikan," tandasnya, Kamis (24/4).

Menurutnya, banyak layanan perizinan yang mundur penyelesaiannya karena faktor komunikasi. Misalnya, ada persyaratan yang masih kurang, tapi antara pemohon dan dinas terkait hanya saling menunggu. Oleh sebab itu, ia meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Kota Yogyakarta yang mengampu Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk lebih proaktif memberitahu dan membina pemohon perizinan yang berkali-kali gagal.

"Masyarakat juga setelah diberi tahu itu harus cepat (memenuhi persyaratan). Kalau tidak tahu, tanya. Kadang-kadang masyarakat sudah diberi tahu, tapi

PERLU PERCEPATAN

- Sekitar 1.500 permohonan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Yogyakarta terkatung-katung alias mengalami kemendakan proses.
- Sebagian permohonan izin PBG yang prosesnya terhenti, ditengarai akibat kurangnya persyaratan dan penyelesaiannya mundur karena kurangnya komunikasi pemohon dan dinas terkait.
- Wali Kota Yogya Hasto Wardoyo ingin permohonan PBG segera diselesaikan di 100 hari kerjanya, atau paling tidak pada penghujung 2025.

tidak segera melengkapi. Yang *gitu-gitu* jangan dibicarakan, karena banyak izin itu untuk keperluan usaha. Jangan menunda tumpukan 'utang' kita kepada masyarakat," tandas Hasto.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Kota Yogya, Budi Santosa, berujar, selaras hasil kaji-an, permohonan izin PBG mandek karena tidak memenuhi syarat, kurang syarat dan tidak tahu. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya pun sudah membuka layanan terpadu Klinik Persewaan dan Investasi, baik secara *online* atau *offline* di Mal Pelayanan Publik.

"Awalnya konsultasi masih *online* dan terpencair-pencar di semua OPD. Akhirnya kita jadikan satu agar masyarakat bisa berkonsultasi perizinan dan investasi baik *offline* dan *online*. Harapannya, dengan Klinik Perizinan dan Investasi, masyarakat bisa menjadi tahu dan ketika masuk di aplikasi (perizinan) syarat-syaratnya bisa dipenuhi," katanya.

Dijelaskan, sejak 2022 sampai sekarang, sudah diterbitkan 1.858 PBG, melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kementerian Pe-

kerjaan Umum RI. Sebelum mengajukan izin di SIMBG, pemohon harus mengajukan permohonan PBG di DPMP-TSP karena ada berkas persyaratan yang harus dipenuhi. "Kemudian, untuk rekomendasi teknis perizinan PBG ditangani Dinas PUPKP (Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Yogyakarta," tandasnya.

Pencermatan

Sementara, Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti, menambahkan, sekitar 1.500 permohonan izin PBG yang belum selesai itu berdasarkan data SIMBG. Pencermatan pun akan dilakukan, karena terdapat potensi permohonan ganda. Yakni, permohonan yang awalnya ada kekurangan, namun malah didaftarkan dengan permohonan baru.

"Akan kami cermati lagi permohonan yang tidak bisa diteruskan karena beberapa alasan. Ada yang mengajukan PBG sementara bangunan sudah jadi, kami kembalikan untuk mengajukan SLF," ujarnya.

"Ada juga permohonan kita kembalikan karena ada kekurangan, tapi sudah lebih dari satu bulan tidak kembali (melengkapi)," pungkas Umi. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005